

Nila-nilai Politik Islam dalam Memperkuat Masyarakat Madani Pada Partai NasDem Sumatera Utara

Yusril Ihza Mahendra Siregar^{1*}, Elly Warnisyah Hrp², Agusman Damanik³

¹⁻³ Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Corresponding Author's e-mail: yusril3001243006@uinsu.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4 Agustus 2026

Page: 1710 - 1720

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3378>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3378>

Article History:

Received: 13-07-2026

Revised: 06-08-2026

Accepted: 06-08-2026

Abstract: This study aims to analyze the implementation of Islamic political values in strengthening civil society within the North Sumatra NasDem Party, to describe the forms of this implementation across party policies, programs, and activities, and to identify the factors supporting and hindering the internalization of these values. The study employs a qualitative approach using a case study design. Data were gathered through in-depth interviews, observation, and documentation. Research informants consisted of North Sumatra NasDem Party cadres and religious figures selected via purposive sampling. Data analysis involved data reduction, data presentation, and conclusion drawing, while data validity was verified using source and method triangulation techniques. The results indicate that the North Sumatra NasDem Party implements Islamic political values substantively, focusing on justice (*adl*), trustworthiness (*amanah*), consultation (*syura*), equality and tolerance, and social welfare (*masalah*). This implementation is manifested in various party policies, social-community programs, political education, cadre development, MSME empowerment, humanitarian and educational aid, religious activities, and consultative decision-making mechanisms. These values contribute to strengthening a civil society that is democratic, participatory, inclusive, and civilized. The study also finds that the internalization of Islamic political values is supported by the party's commitment to clean politics, the religious culture of North Sumatra's society, community empowerment programs, and efforts in cadre development and political education. Conversely, obstacles include political pragmatism, high political costs, elite interests, and low public political literacy. The study concludes that the implementation of Islamic political values within the North Sumatra NasDem Party emphasizes universal ethical values aligned with democratic principles, serving as a means to strengthen civil society.

Keywords: Islamic Politics, Islamic Political Values, Civil Society, NasDem Party, North Sumatra.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai politik Islam dalam memperkuat masyarakat madani pada Partai NasDem Sumatera Utara, mendeskripsikan bentuk implementasi nilai-nilai politik Islam dalam kebijakan, program, dan aktivitas partai, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat internalisasi nilai-nilai politik Islam di Partai NasDem Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas kader Partai NasDem Sumatera Utara dan tokoh agama yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai NasDem Sumatera Utara mengimplementasikan nilai-nilai politik Islam secara substantif melalui nilai keadilan (*adl*), amanah, musyawarah (*syura*), persamaan dan toleransi, serta kemaslahatan sosial (*masalah*). Implementasi tersebut diwujudkan dalam berbagai kebijakan partai, program sosial kemasyarakatan, pendidikan politik, kaderisasi, pemberdayaan UMKM, bantuan kemanusiaan, bantuan pendidikan, kegiatan keagamaan, serta mekanisme musyawarah dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai tersebut berkontribusi terhadap penguatan masyarakat madani yang demokratis, partisipatif, inklusif, dan berkeadaban. Penelitian ini juga menemukan bahwa internalisasi nilai-nilai politik Islam didukung oleh komitmen partai terhadap politik bersih, budaya religius masyarakat Sumatera Utara, program pemberdayaan masyarakat, serta kaderisasi dan pendidikan politik. Sementara itu, hambatan yang dihadapi meliputi pragmatisme politik, tingginya biaya politik, kepentingan elite, serta rendahnya literasi politik masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi

nilai-nilai politik Islam di Partai NasDem Sumatera Utara lebih menekankan nilai-nilai etika universal yang selaras dengan prinsip demokrasi dan menjadi salah satu upaya dalam memperkuat masyarakat madani.

Kata Kunci: Politik Islam, Nilai-nilai Politik Islam, Masyarakat Madani, Partai NasDem, Sumatera Utara.

PENDAHULUAN

Politik Islam merupakan konsep pengelolaan kehidupan masyarakat dan negara yang berlandaskan ajaran Islam dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan, keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan umat manusia. Dalam Islam, politik tidak dipahami hanya sebagai aktivitas perebutan kekuasaan atau strategi mempertahankan pemerintahan, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual untuk menata kehidupan manusia sesuai nilai-nilai ilahiah. Konsep ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan ijtihad ulama yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Oleh sebab itu, politik Islam memiliki dimensi yang luas karena mencakup aspek etika, sosial, hukum, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan.¹

Secara etimologis, istilah politik dalam Islam dikenal dengan kata *siyāsah*. Kata ini berasal dari bahasa Arab *sāsa-yasūsu-siyāsatan* yang berarti mengatur, mengendalikan, memimpin, membimbing, dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam tradisi Arab klasik, istilah ini digunakan untuk menggambarkan aktivitas mengatur urusan rakyat agar tercipta ketertiban dan kemaslahatan bersama. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa politik Islam tidak sekadar berkaitan dengan pemerintahan, tetapi juga menyangkut seni mengelola masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip moral dan hukum Islam.²

Dalam konteks Indonesia, politik Islam berkembang melalui partisipasi umat Islam dalam sistem demokrasi, baik melalui organisasi masyarakat, lembaga dakwah, maupun partai politik. Politik Islam di Indonesia cenderung mengambil bentuk moderat dengan mengedepankan nilai persatuan, toleransi, demokrasi, dan keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa politik Islam tidak bertentangan dengan sistem negara demokrasi, melainkan dapat menjadi sumber nilai moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik Islam di Indonesia lebih menonjolkan pendekatan substantif yang menekankan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan politik daripada pendekatan simbolik semata.³

Partai NasDem didirikan pada 2011 sebagai salah satu partai baru dalam kancah perpolitikan Indonesia kontemporer. Berbasis doktrin restorasi nasional dan semangat pluralisme, NasDem memposisikan diri sebagai partai terbuka yang menerima berbagai elemen masyarakat tanpa diskriminasi agama, suku, atau golongan. 23 Namun demikian, kekuatan pemilih Muslim di berbagai daerah, termasuk Sumatera Utara, memberikan tantangan tersendiri bagi NasDem untuk merumuskan pesan politik yang resonan dengan nilai-nilai keagamaan.

Sumatera utara sendiri merupakan provinsi dengan keragaman etnis dan agama yang tinggi. Keberagaman ini menjadikan dinamika politik lokal menarik untuk diteliti terutama dalam konteks bagaimana partai politik mengadopsi nilai-nilai sosial dan religius untuk memperkuat jaringan politiknya. Selain itu, karakter masyarakat Sumut yang religius namun pluralistik juga menjadikan penelitian ini relevan secara akademis dan praktis.⁴

Dalam praktik politiknya, Partai NasDem sering menekankan nilai-nilai demokratis, toleransi, dan inklusivitas. Pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana nilai-nilai politik Islam diinternalisasikan dalam strategi, program, serta kebijakan lokal partai, sehingga mampu memperkuat struktur masyarakat madani di tingkat daerah. Di samping itu, terdapat pula

¹ Azamudin, *Pendekatan dan Teori dalam Politik Islam*. Sophisticated: Jurnal Pemikiran Politik Islam, Vol. 3, No. 1, 2025, h. 12–14.

² Ahmad Musonnif Alfi dan Moh. Wildan Romadhoni, *Pendekatan Politis dalam Studi Islam*. Qolamuna: Jurnal Studi Islam, Vol. 8, No. 1, 2022, h. 3–5.

³ Hisny Fajrussalam dkk., *Pelaksanaan Politik di Indonesia Berdasarkan Ajaran dan Nilai Dasar Politik Islam...*, h. 50-52.

⁴ BPS Provinsi Sumatera Utara, Statistik Sosial 2023.

tantangan penerjemahan nilai Islam ke ranah politik praktis yang tidak selalu linier, terutama ketika menghadapi realitas sosial yang kompleks.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai politik Islam diimplementasikan oleh Partai NasDem Sumatera Utara dalam upaya menguatkan masyarakat madani.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan memahami secara mendalam implementasi nilai-nilai politik Islam dalam menguatkan masyarakat madani pada Partai NasDem Sumatera Utara berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan serta observasi terhadap aktivitas Partai NasDem Sumatera Utara. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dokumen partai, peraturan perundang-undangan, serta literatur lain yang relevan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi nilai-nilai politik Islam dalam menguatkan masyarakat madani pada partai nasdem sumut

Implementasi nilai-nilai politik Islam di Partai NasDem Sumatera Utara menunjukkan adanya upaya mengintegrasikan prinsip-prinsip etika Islam ke dalam praktik politik, meskipun NasDem bukan merupakan partai berbasis Islam. Berdasarkan hasil wawancara, implementasi tersebut tercermin dalam lima nilai utama, yaitu keadilan, amanah, musyawarah, persamaan dan toleransi, serta kemaslahatan sosial, yang berkontribusi terhadap penguatan masyarakat madani.

1. Implementasi nilai keadilan (*'adl*)

Partai NasDem Sumut menerapkan prinsip keadilan melalui pelayanan politik yang inklusif tanpa membedakan agama, suku, ras, maupun golongan. Implementasi ini diwujudkan melalui penyaluran bantuan sosial dan kemanusiaan, kegiatan kurban Iduladha, santunan anak yatim, pelayanan kesehatan gratis, serta pendidikan politik bagi masyarakat. Praktik tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dalam politik Islam yang menekankan persamaan hak, pemerataan kesejahteraan, dan kemaslahatan umum.⁵

2. implementasi nilai amanah dan transparansi

Partai NasDem Sumut berupaya membangun budaya politik yang bersih melalui konsep politik tanpa mahar, penguatan integritas kader, serta pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Nilai amanah tercermin dalam komitmen menjaga kepercayaan publik, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa budaya politik pragmatis, korupsi, dan meningkatnya tuntutan akuntabilitas dari masyarakat.⁶

3. Implementasi nilai musyawarah (*syura*)

Partai NasDem dalam Pengambilan keputusan di lingkungan NasDem Sumut dilakukan melalui rapat internal, forum diskusi kader, dan penyerapan aspirasi masyarakat. Partai juga melaksanakan dialog publik, reses anggota legislatif, seminar kebangsaan, serta melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyusunan program. Praktik ini menunjukkan penerapan prinsip syura yang mendorong partisipasi, keterbukaan, dan pengambilan keputusan secara kolektif sebagai dasar penguatan masyarakat madani.⁷

4. Implementasi nilai persamaan dan toleransi

Partai Nasdem Sebagai daerah yang multikultural, Sumatera Utara menuntut pendekatan politik yang inklusif. NasDem Sumut berupaya menjaga persatuan dengan menghormati seluruh

⁵ Iskandar, Ketua DPW NasDem Sumut, Wawancara Pribadi, Medan, 6 April 2026.

⁶ Afif Abdillah, Ketua NasDem Kota Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 6 April 2026

⁷ Iskandar, Ketua DPW NasDem Sumut, Wawancara Pribadi, Medan, 6 April 2026.

kelompok masyarakat tanpa diskriminasi melalui dialog lintas agama, kegiatan sosial kemanusiaan, pendidikan politik yang menekankan toleransi, serta pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam aktivitas politik. Implementasi ini memperkuat solidaritas sosial, mengurangi potensi konflik identitas, dan mendukung terciptanya kehidupan demokrasi yang harmonis.⁸

5. Implementasi nilai kemaslahatan sosial (*maslahah*)

Partai NasDem menjalankan berbagai kegiatan sosial, seperti bantuan kemasyarakatan, pendidikan politik, pemberdayaan masyarakat, bantuan bencana, dan kegiatan keagamaan, termasuk kurban Iduladha. Program-program tersebut menunjukkan bahwa aktivitas politik tidak hanya berorientasi pada kepentingan elektoral, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan tujuan politik Islam yang menempatkan kemaslahatan, keadilan sosial, dan pemberdayaan masyarakat sebagai orientasi utama.⁹

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai NasDem Sumatera Utara telah mengimplementasikan nilai-nilai politik Islam melalui berbagai kebijakan, program, dan aktivitas sosial-politik yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Implementasi nilai keadilan, amanah, musyawarah, persamaan, toleransi, dan kemaslahatan sosial memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip politik Islam sekaligus mendukung penguatan masyarakat madani yang demokratis, partisipatif, inklusif, dan berkeadaban. Meskipun demikian, konsistensi pelaksanaan nilai-nilai tersebut masih menghadapi tantangan berupa budaya politik pragmatis, kepentingan elite, dan rendahnya pendidikan politik masyarakat, sehingga diperlukan komitmen berkelanjutan agar implementasinya semakin efektif.

Bentuk Implementasi nilai Politik Islam dalam Kebijakan, Program, dan Aktivitas

a. Implementasi Nilai-nilai Politik Islam dalam Kebijakan Partai NasDem Sumut

Nilai-nilai politik Islam pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan simbol keagamaan, tetapi lebih menekankan pada prinsip-prinsip etika sosial dan politik seperti amanah (kejujuran), *'adl* (keadilan), musyawarah, *maslahah* (kemanfaatan umum), persamaan, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks demokrasi Indonesia, implementasi nilai-nilai tersebut dapat ditemukan pada berbagai partai politik, termasuk Partai NasDem yang mengusung gagasan politik restorasi dan pembangunan demokrasi yang berintegritas. Di Sumatera Utara, implementasi nilai-nilai politik Islam oleh Partai NasDem tidak diwujudkan dalam bentuk perjuangan negara Islam atau formalisasi syariat, melainkan melalui kebijakan partai, program sosial kemasyarakatan, pendidikan politik, kaderisasi, serta aktivitas politik yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep masyarakat madani yang menempatkan keadilan, partisipasi, toleransi, dan kesejahteraan sosial sebagai pilar utama kehidupan demokratis.¹⁰

Implementasi nilai-nilai politik Islam dalam partai politik modern merupakan salah satu bentuk aktualisasi etika keagamaan dalam kehidupan demokrasi. Dalam konteks Partai NasDem Sumatera Utara, nilai-nilai politik Islam tidak diwujudkan melalui simbol-simbol formal keagamaan, melainkan melalui pendekatan substantif yang menekankan etika politik, keadilan sosial, pelayanan publik, dan tanggung jawab moral dalam kepemimpinan. Hal ini menunjukkan bahwa NasDem berupaya menempatkan Islam sebagai sumber nilai universal yang dapat diterapkan dalam sistem politik demokratis dan masyarakat yang plural. Setelah melaksanakan wawancara di kantor DPW Partai NasDem Sumatera Utara, peneliti menghimpun berbagai informasi dari sejumlah kader partai yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. Salah satu narasumber utama adalah Bapak Mustafa Kamil Adam selaku kader Partai NasDem Sumatera Utara.

Dalam wawancara tersebut, beliau memberikan penjelasan, pandangan, serta tanggapan terkait isu yang menjadi fokus penelitian. Bagaimana partai nasdem sumut mengimplementasi

⁸ Nusantara Tarigan Silangit, Ketua NasDem Deli Serdang, Wawancara Pribadi, Deli Serdang, 13 April 2026.

⁹ Defri Noval, Kader NasDem Sumut, Wawancara Pribadi, Medan, 20 April 2026.

¹⁰ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), 205–220.

nilai-nilai politik Islam dalam kebijakan partai? Bapak Mustafa Kamil Adam memperlihatkan bahwa NasDem Sumut memandang nilai-nilai Islam sebagai prinsip moral yang bersifat universal dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat. Nilai seperti amanah, kejujuran, persamaan, dan musyawarah merupakan fondasi penting dalam tradisi politik Islam. Dalam perspektif Islam, politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi sarana untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat. Karena itu, orientasi kebijakan pada keadilan sosial dan kesejahteraan publik menunjukkan adanya upaya menghadirkan politik yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Namun demikian, implementasi nilai politik Islam di partai politik modern juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah pragmatisme politik dan tingginya biaya kontestasi politik. Dalam praktik demokrasi, partai sering dihadapkan pada kebutuhan mempertahankan kekuasaan dan memenangkan pemilu sehingga idealisme politik terkadang berbenturan dengan kepentingan praktis. Akibatnya, nilai-nilai moral yang diusung partai berpotensi mengalami degradasi apabila tidak disertai pengawasan internal dan keteladanan elite politik. Karena itu, keberhasilan internalisasi nilai politik Islam tidak hanya bergantung pada kebijakan partai, tetapi juga pada konsistensi perilaku elite dan kader dalam kehidupan politik sehari-hari. Keteladanan elite menjadi faktor penting karena masyarakat cenderung menilai partai berdasarkan perilaku tokoh-tokohnya. Jika elite partai menunjukkan integritas, kesederhanaan, dan keberpihakan kepada rakyat, maka nilai-nilai politik Islam akan lebih mudah diterima dan dipercaya masyarakat.¹¹

Secara keseluruhan, Setelah peneliti menarik kesimpulan, bagaimana yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti berpendapat, menunjukkan bahwa Partai NasDem Sumut berusaha mengimplementasikan nilai-nilai politik Islam melalui pendekatan etika dan kebijakan substantif. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, amanah, kejujuran, musyawarah, dan pelayanan publik menjadi dasar dalam membangun politik yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa politik Islam dapat berjalan selaras dengan demokrasi modern dan masyarakat plural apabila dipahami sebagai sumber nilai moral universal, bukan sekadar identitas simbolik.

b. Implementasi Nilai-nilai Politik Islam dalam Program Partai NasDem Sumut

Program-program sosial yang dijalankan oleh Partai Partai NasDem Sumatera Utara menunjukkan adanya upaya implementasi nilai-nilai politik Islam melalui pendekatan kemasyarakatan yang substantif. Setelah melaksanakan wawancara di kantor DPW Partai NasDem Sumatera Utara, peneliti mengumpulkan berbagai informasi dari sejumlah kader partai yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini. Salah satu narasumber yang diwawancarai adalah Bapak Mustafa Kamil Adam selaku kader Partai NasDem Sumatera Utara. Dalam wawancara tersebut, beliau memberikan penjelasan, pandangan, serta tanggapan terkait fokus permasalahan yang sedang diteliti. Apa bentuk program partai nasdem sumut yang mencerminkan nilai-nilai politik Islam? Bapak Mustafa Kamil Adam menjawab bahwa Bentuk kegiatan seperti bantuan kemanusiaan, pemberdayaan UMKM, bantuan pendidikan, santunan anak yatim, bantuan rumah ibadah, dan kegiatan sosial bagi masyarakat kurang mampu memperlihatkan bahwa orientasi politik partai tidak hanya terfokus pada perebutan kekuasaan, tetapi juga pada pelayanan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif politik Islam, kebijakan dan program seperti ini dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi nilai masalah atau kemaslahatan umum yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan kekuasaan.

Kegiatan bantuan kemanusiaan dan santunan anak yatim mencerminkan adanya perhatian terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial. Selain santunan sosial, program bantuan pendidikan menunjukkan adanya orientasi pembangunan manusia secara berkelanjutan. Pendidikan dalam perspektif Islam dipandang sebagai instrumen utama untuk membangun kualitas masyarakat dan meningkatkan derajat kehidupan umat. Politik Islam tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas kekuasaan, tetapi juga menciptakan masyarakat yang berilmu, mandiri, dan berdaya saing. Karena itu, bantuan pendidikan memiliki makna strategis dalam

¹¹ Mustafa Kamil Adam, kader DPW Partai NasDem Sumatera Utara, wawancara oleh penulis, Medan, 12 April 2026.

pembangunan masyarakat madani karena pendidikan dapat memperkuat kesadaran sosial, partisipasi politik, dan kemampuan ekonomi Masyarakat.

Menurut Azyumardi Azra, pembangunan pendidikan dalam masyarakat Muslim modern merupakan bagian penting dari proses transformasi sosial dan penguatan demokrasi karena pendidikan dapat melahirkan masyarakat yang kritis, toleran, dan partisipatif.¹² Dalam konteks ini, bantuan pendidikan yang dilakukan NasDem Sumut tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga memiliki dimensi pemberdayaan sosial jangka panjang. Pendidikan membantu masyarakat keluar dari kemiskinan struktural dan memperkuat kapasitas sosial warga dalam kehidupan demokrasi.¹²

Program pemberdayaan UMKM juga menunjukkan orientasi ekonomi kerakyatan yang selaras dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Islam memandang kegiatan ekonomi harus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Oleh sebab itu, pemberdayaan UMKM memiliki arti penting karena sektor usaha kecil dan menengah merupakan fondasi ekonomi masyarakat bawah. Melalui bantuan modal, pendampingan usaha, dan dukungan terhadap pelaku UMKM, partai berupaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Dalam masyarakat plural seperti Sumatera Utara, bantuan terhadap rumah ibadah memiliki makna penting karena dapat memperkuat harmoni sosial dan toleransi antarumat beragama. Politik Islam yang substantif tidak mendorong diskriminasi agama, tetapi justru mengajarkan penghormatan terhadap keberagaman sosial selama tetap menjaga nilai keadilan dan kemanusiaan.

Namun demikian, implementasi program sosial dalam politik juga menghadapi tantangan serius. Salah satu tantangan tersebut adalah menjaga konsistensi antara program pelayanan sosial dan kepentingan politik praktis. Dalam banyak kasus, program bantuan sosial sering dipersepsikan sebagai alat pencitraan politik semata. Oleh karena itu, keberlanjutan program dan ketulusan pelayanan menjadi faktor penting agar kegiatan sosial tidak hanya bersifat simbolik atau musiman menjelang pemilu. Selain itu, keberhasilan internalisasi nilai politik Islam juga sangat bergantung pada integritas kader dan elite partai. Jika program sosial tidak disertai perilaku politik yang bersih dan transparan, maka nilai-nilai moral yang dibangun melalui kegiatan sosial dapat kehilangan makna di mata masyarakat. Karena itu, keteladanan kader, akuntabilitas program, dan keberpihakan nyata kepada masyarakat menjadi syarat penting dalam membangun politik berbasis kemaslahatan. Secara keseluruhan, setelah peneliti menarik kesimpulan, bagaimana yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti berpendapat, menunjukkan bahwa Partai NasDem Sumut berusaha mengimplementasikan nilai-nilai politik Islam melalui program sosial kemasyarakatan yang berorientasi pada pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, solidaritas sosial, dan partisipasi politik. Program-program tersebut mencerminkan prinsip masalah, keadilan sosial, ukhuwwah insaniyyah, dan musyawarah yang menjadi bagian penting dalam tradisi politik Islam. Melalui pendekatan ini, partai berupaya membangun hubungan politik yang lebih dekat dengan masyarakat serta memperkuat peran politik sebagai instrumen pelayanan dan pemberdayaan sosial dalam kehidupan demokrasi.

c. Implementasi Nilai-nilai politik Islam dalam Aktivitas Partai NasDem Sumut

Setelah melaksanakan wawancara di kantor DPW Partai NasDem Sumatera Utara, peneliti mengumpulkan berbagai informasi dari sejumlah kader partai yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. Salah satu narasumber utama dalam penelitian ini adalah Bapak Mustafa Kamil Adam selaku Kader Partai NasDem Sumatera Utara. Dalam wawancara tersebut, beliau memberikan penjelasan, pandangan, serta tanggapan terkait isu yang menjadi fokus penelitian. Apa faktor utama yang mendukung internalisasi nilai-nilai politik Islam dinasdem sumut? Bapak Mustafa Kamil Adam menjawab bahwa dalam pengambilan keputusan, kami mengutamakan musyawarah, baik dalam rapat internal maupun ketika menentukan arah kebijakan organisasi. Setiap kader diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dan masukan. Kami percaya bahwa keputusan yang baik lahir dari diskusi bersama, bukan keputusan sepihak. Musyawarah juga kami

¹² Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 145–162.

terapkan ketika berinteraksi dengan masyarakat, misalnya saat menyerap aspirasi warga atau menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan daerah.¹³

Setelah peneliti menarik kesimpulan, bagaimana yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti berpendapat, dapat dipahami bahwa implementasi musyawarah bukan hanya sekadar mekanisme organisasi, tetapi juga merupakan bentuk nyata internalisasi nilai-nilai politik Islam dalam kehidupan politik modern. Musyawarah mengandung nilai keterbukaan, partisipasi, keadilan, persamaan, dan penghargaan terhadap aspirasi bersama. Dalam praktiknya, budaya musyawarah mampu memperkuat legitimasi politik, mengurangi dominasi elite, meningkatkan kualitas demokrasi internal partai, serta mempererat hubungan antara organisasi politik dan masyarakat. Dengan demikian, musyawarah dapat dipandang sebagai salah satu prinsip penting dalam membangun politik yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Internalisasi Nilai-nilai Politik Islam

Faktor Pendukung:

a. Komitmen Partai terhadap Politik Bersih

Setelah melaksanakan wawancara di kantor DPW Partai NasDem Sumatera Utara, peneliti memperoleh berbagai informasi dari sejumlah kader partai yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. Salah satu narasumber yang diwawancarai adalah Bapak Defri Noval selaku kader Partai NasDem Sumatera Utara. Dalam wawancara tersebut, beliau memberikan penjelasan, pandangan, serta tanggapannya terkait fokus permasalahan yang sedang diteliti. Apa faktor utama yang mendukung internalisasi nilai-nilai politik Islam di NasDem Sumut? Bapak Defri Noval menjawab bahwa Komitmen terhadap politik bersih dan politik tanpa mahar merupakan salah satu gagasan penting yang sering dikaitkan dengan upaya reformasi politik di Indonesia

b. Budaya Sosial Religius Masyarakat Sumatera Utara

Kultur religius masyarakat Sumatera Utara menjadi salah satu faktor penting yang mendukung proses internalisasi nilai-nilai politik Islam dalam aktivitas politik dan sosial Partai NasDem Sumut. Setelah melaksanakan wawancara dengan sejumlah tokoh agama di Sumatera Utara, peneliti berhasil mengumpulkan berbagai informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Salah satu narasumber yang diwawancarai adalah Bapak Budi selaku tokoh agama di Sumatera Utara. Dalam wawancara tersebut, beliau menyampaikan pandangan, pengalaman, serta pemikirannya terkait topik yang diteliti. Apakah kondisi Masyarakat Sumut ikut mendukung penerapan nilai politik Islam? Bapak Budi menjawab kondisi sosial masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai agama, tradisi musyawarah, semangat gotong royong, serta kepedulian terhadap sesama menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penerapan nilai-nilai politik yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, budaya lokal masyarakat tidak hanya menjadi identitas sosial, tetapi juga menjadi modal sosial dan moral yang memperkuat penerimaan masyarakat terhadap pendekatan politik yang mengedepankan nilai keagamaan dan kemanusiaan.

c. Program Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Setelah melaksanakan wawancara di kantor DPW Partai NasDem Sumatera Utara, peneliti memperoleh berbagai informasi dari sejumlah kader partai yang menjadi informan dalam penelitian ini. Salah satu informan tersebut adalah Bapak Andika Kesuma Sitepu selaku kader Partai NasDem Sumatera Utara. Dalam wawancara yang dilakukan, beliau memberikan penjelasan serta pandangannya terkait topik penelitian yang sedang dikaji, bagaimana program partai mendukung Internalisasi nilai-nilai politik Islam? Bapak Andika Kesuma Sitepu menjawab bahwa Oleh karena itu, berbagai program sosial yang dijalankan oleh Partai NasDem Sumut dapat dipahami sebagai

¹³ Mustafa Kamil Adam, kader DPW Partai NasDem Sumatera Utara, wawancara oleh penulis, Medan, 12 April 2026.

bentuk implementasi nilai-nilai politik Islam yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasi utama perjuangan politik.¹⁴

d. Kaderisasi dan Pendidikan Politik

Kaderisasi merupakan salah satu unsur paling penting dalam keberlangsungan dan kualitas sebuah partai politik. Tanpa kaderisasi yang baik, partai politik akan mengalami krisis kepemimpinan, lemahnya arah perjuangan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat. Dalam konteks Partai NasDem Sumatera Utara, kaderisasi dipandang sebagai proses strategis untuk membentuk kader yang tidak hanya memahami visi dan misi partai, tetapi juga memiliki integritas moral, kemampuan organisasi, serta tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Pernyataan informan yang menegaskan bahwa kaderisasi penting agar kader memahami visi partai, etika politik, dan tanggung jawab sosial menunjukkan bahwa partai tidak hanya berorientasi pada kepentingan elektoral semata, melainkan juga pada pembangunan karakter politik kader.

Namun keberhasilan kaderisasi tetap sangat bergantung pada konsistensi implementasi nilai-nilai tersebut dalam praktik politik sehari-hari. Jika partai mampu menjaga integritas moral elite dan menjadikan kaderisasi sebagai proses pembentukan karakter, maka kaderisasi akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan budaya politik yang bersih, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Sebaliknya, jika kaderisasi hanya dijadikan formalitas organisasi tanpa keteladanan nyata, maka nilai-nilai yang diajarkan akan sulit diwujudkan dalam praktik politik yang sesungguhnya.¹⁵

Faktor Penghambat:

a. Pragmatisme Politik

Pragmatisme politik merupakan tantangan terbesar dalam proses internalisasi nilai-nilai politik Islam di partai politik Indonesia. Dalam praktik politik modern, partai politik tidak hanya berfungsi sebagai alat perjuangan ideologi dan aspirasi rakyat, tetapi juga sebagai instrumen perebutan serta mempertahankan kekuasaan. Kondisi ini membuat partai sering menghadapi dilema antara mempertahankan idealisme moral dengan tuntutan realitas politik praktis yang penuh persaingan, kompromi, dan kepentingan kekuasaan. Akibatnya, nilai-nilai politik Islam seperti kejujuran, amanah, keadilan, kesederhanaan, dan musyawarah sering kali sulit diterapkan secara konsisten dalam praktik politik sehari-hari.

b. Tingginya Biaya Politik

Biaya politik yang tinggi merupakan salah satu tantangan paling serius dalam praktik demokrasi modern di Indonesia. Dalam setiap kontestasi politik, baik pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, maupun pemilihan presiden, kandidat membutuhkan sumber daya finansial yang sangat besar untuk membiayai kampanye, membangun jaringan politik, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, hingga mempertahankan dukungan politik. Kondisi tersebut menyebabkan politik tidak hanya menjadi arena pertarungan gagasan dan ideologi, tetapi juga pertarungan modal dan kekuatan ekonomi. Akibatnya, nilai-nilai ideal dalam politik, termasuk nilai-nilai politik Islam seperti amanah, kejujuran, keadilan, dan pelayanan publik, sering menghadapi hambatan serius dalam implementasinya.

Setelah melaksanakan wawancara di kantor Partai NasDem Kota Medan, peneliti memperoleh berbagai informasi dari sejumlah kader partai yang menjadi informan penelitian. Salah satu informan, yaitu Bapak Afif Abdillah selaku Ketua Partai NasDem Kota Medan, memberikan penjelasan dan pandangannya mengenai topik yang menjadi fokus penelitian. Apakah biaya politik menjadi hambatan dalam penerapan nilai politik Islam? Bapak Afif Abdillah menyatakan bahwa Ya, biaya politik yang tinggi menjadi tantangan serius. Dalam kontestasi politik, kandidat membutuhkan biaya besar untuk kampanye dan mobilisasi massa. Dalam sistem demokrasi elektoral, biaya politik tinggi muncul karena proses politik membutuhkan aktivitas yang

¹⁴ Andika Kesuma Sitepu, Kader Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Sumatera Utara, wawancara oleh penulis, Medan, 13 April 2026.

¹⁵ Colm A. Fox dan Jeremy Menchik, *Islamic Political Parties and Election Campaigns in Indonesia*. Party Politics Vol. 29, No. 4, 2022, h. 640

sangat luas dan kompleks. Kandidat harus mencetak alat peraga kampanye, melakukan perjalanan politik ke berbagai daerah, membangun tim sukses, menyelenggarakan kegiatan sosial, hingga melakukan pendekatan komunikasi politik kepada masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial juga menambah kebutuhan biaya politik karena kandidat dituntut membangun citra politik yang kuat melalui media digital, iklan, dan strategi komunikasi modern. Semua kebutuhan tersebut membutuhkan dana besar yang tidak dapat dipenuhi hanya dengan kemampuan pribadi sebagian besar kader politik.

c. Lemahnya Konsistensi Moral Sebagian Elite Politik

Setelah peneliti melaksanakan wawancara di kantor DPW Partai NasDem Sumatera Utara, peneliti memperoleh berbagai informasi dari beberapa kader partai yang menjadi informan penelitian. Salah satu informan, yaitu Bapak Defri Noval selaku kader Partai NasDem Sumatera Utara, memberikan penjelasan dan pandangannya terkait fokus penelitian yang sedang dikaji. Apakah integritas elite partai juga mempengaruhi internalisasi nilai Islam? Bapak Defri Noval menjawab bahwa Tentu, Keteladanan elite sangat penting karena masyarakat melihat perilaku elite sebagai cerminan partai. Dalam perspektif politik Islam, kepemimpinan memiliki dimensi moral yang sangat kuat. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut memiliki kemampuan administratif dan strategi politik, tetapi juga diwajibkan menunjukkan akhlak yang baik, kejujuran, amanah, keadilan, serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Karena itu, internalisasi nilai-nilai politik Islam tidak akan berhasil apabila elite partai gagal menjadi teladan moral bagi kader maupun masyarakat luas. Ketika perilaku elite bertentangan dengan nilai-nilai yang disampaikan partai, maka akan muncul krisis kepercayaan publik terhadap integritas partai tersebut.

Menurut Miriam Budiardjo, legitimasi politik dalam sistem demokrasi modern sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap elite politik dan institusi politik yang ada. 347 Kepercayaan publik tersebut dibangun melalui konsistensi antara ucapan dan tindakan elite politik. Dalam konteks ini, partai politik yang membawa semangat perubahan dan restorasi politik, seperti NasDem, memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk menjaga integritas perilaku para elitnya agar tetap sesuai dengan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan anti korupsi yang sering disampaikan kepada masyarakat.

d. Politik Identitas dan Polarisasi

Setelah peneliti melaksanakan wawancara di kantor Partai NasDem Deli Serdang, peneliti memperoleh berbagai informasi dari beberapa kader partai yang menjadi informan penelitian. Dalam wawancara tersebut, bapak Nusantara Tarigan Silangit selaku Ketua Partai NasDem Deli Serdang memberikan keterangan dan pandangannya terkait topik yang sedang diteliti. Apakah pluralitas masyarakat Sumut menjadi tantangan tersendiri? Bapak Nusantara Tarigan Silangit menjawab bahwa Sumut memiliki masyarakat yang sangat plural, sehingga partai harus berhati-hati agar nilai-nilai Islam yang dibawa tetap bersifat inklusif dan tidak menimbulkan polarisasi. Dalam konteks tersebut, Partai Partai NasDem Sumatera Utara menghadapi tantangan yang cukup besar dalam menginternalisasikan nilai-nilai politik Islam ke dalam kebijakan maupun aktivitas politik partai. Sebagai partai nasionalis-religius, NasDem berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam universal seperti keadilan, amanah, kejujuran, persamaan, dan musyawarah dengan semangat pluralisme kebangsaan. Akan tetapi, proses tersebut membutuhkan kehati-hatian agar nilai-nilai Islam yang dibawa tidak dipersepsikan sebagai upaya dominasi agama tertentu terhadap kelompok masyarakat lainnya.

Samuel P. Huntington menjelaskan bahwa konflik identitas sering muncul ketika kelompok sosial merasa identitas budayanya terancam oleh kelompok lain.³⁵⁵ Dalam masyarakat plural seperti Sumatera Utara, narasi politik yang terlalu menonjolkan superioritas identitas tertentu dapat memicu rasa ketidakadilan sosial dan memperbesar potensi konflik horizontal. Oleh sebab itu, partai politik perlu membangun komunikasi politik yang menekankan persatuan, dialog, dan kepentingan bersama dibandingkan perbedaan identitas.¹⁶

¹⁶ Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, (New York: Simon & Schuster, 1996), h. 28.

Menurut Robert N. Bellah, masyarakat madani hanya dapat berkembang apabila terdapat budaya politik yang menghargai pluralisme dan partisipasi social. Jika politik identitas berkembang secara ekstrem, maka masyarakat akan terpecah ke dalam kelompok-kelompok eksklusif yang saling mencurigai. Kondisi tersebut dapat menghambat pembangunan demokrasi, memperlemah solidaritas sosial, dan mengganggu stabilitas politik daerah.¹⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Nilai-Nilai Politik Islam dalam Menguatkan Masyarakat Madani pada Partai NasDem Sumatera Utara", dapat disimpulkan sebagai berikut: Implementasi nilai-nilai politik Islam di Partai NasDem Sumatera Utara dilakukan melalui pendekatan substantif, bukan melalui simbol atau formalisasi syariat Islam. Nilai-nilai keadilan ('adl), amanah, musyawarah (syura), persamaan dan toleransi, serta kemaslahatan sosial (maslahah) diimplementasikan dalam berbagai kebijakan, program, dan aktivitas partai. Implementasi tersebut terlihat melalui pelayanan politik yang inklusif, pendidikan politik, bantuan sosial, kegiatan kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat, dialog publik, penyerapan aspirasi masyarakat, serta berbagai kegiatan keagamaan dan sosial. Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip politik Islam sekaligus berkontribusi dalam memperkuat masyarakat madani yang demokratis, partisipatif, inklusif, dan berkeadaban.

Bentuk implementasi nilai-nilai politik Islam di Partai NasDem Sumatera Utara diwujudkan melalui tiga aspek utama, yaitu kebijakan partai, program partai, dan aktivitas organisasi. Dalam aspek kebijakan, partai mengedepankan politik yang berorientasi pada keadilan sosial, amanah, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam aspek program, implementasi terlihat melalui bantuan pendidikan, pemberdayaan UMKM, santunan anak yatim, bantuan kemanusiaan, bantuan rumah ibadah, pelayanan kesehatan, serta berbagai kegiatan sosial yang mencerminkan prinsip kemaslahatan. Sementara dalam aspek aktivitas organisasi, budaya musyawarah, pendidikan politik, kaderisasi, serta penyerapan aspirasi masyarakat menjadi bentuk nyata internalisasi nilai-nilai politik Islam dalam kehidupan politik modern.

Internalisasi nilai-nilai politik Islam di Partai NasDem Sumatera Utara didukung oleh beberapa faktor, yaitu komitmen partai terhadap politik bersih dan politik tanpa mahar, budaya religius masyarakat Sumatera Utara yang menjunjung tinggi nilai musyawarah dan gotong royong, keberadaan program-program sosial yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, serta sistem kaderisasi dan pendidikan politik yang menanamkan etika politik kepada kader. Di sisi lain, implementasi nilai-nilai tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain pragmatisme politik, tingginya biaya politik, kepentingan elite, tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi, serta belum meratanya pendidikan politik masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang berkelanjutan agar nilai-nilai politik Islam tidak hanya menjadi prinsip normatif, tetapi benar-benar tercermin dalam praktik politik sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: pertama; Bagi Partai NasDem Sumatera Utara, diharapkan terus memperkuat implementasi nilai-nilai politik Islam melalui peningkatan integritas kader, penguatan budaya musyawarah, transparansi dalam pengambilan kebijakan, serta memperluas program pemberdayaan masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata. Kedua; Partai perlu meningkatkan kualitas kaderisasi dan pendidikan politik yang menanamkan nilai-nilai amanah, keadilan, tanggung jawab, dan pelayanan kepada masyarakat sehingga terbentuk kader yang memiliki kompetensi, integritas moral, dan komitmen terhadap kepentingan publik. Ketiga; Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat diharapkan dapat bersinergi dalam meningkatkan literasi dan pendidikan politik masyarakat sehingga partisipasi politik tidak hanya bersifat elektoral, tetapi juga didasarkan pada nilai-nilai demokrasi, etika, dan tanggung jawab sosial. Keempat; Bagi masyarakat, diharapkan lebih aktif mengawasi jalannya pemerintahan dan aktivitas partai politik

¹⁷ Robert N. Bellah, *Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditional World*, (California: University of California Press, 1991), h. 167.

serta berpartisipasi dalam proses demokrasi secara kritis dan konstruktif agar terwujud kehidupan politik yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada Partai NasDem Sumatera Utara. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan membandingkan implementasi nilai-nilai politik Islam pada partai politik lain atau di wilayah yang berbeda agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan nilai-nilai politik Islam dalam sistem politik Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal yang berjudul "Nilai-Nilai Politik Islam dalam Menguatkan Masyarakat Madani pada Partai NasDem Sumatera Utara". Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian politik Islam dan kehidupan demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Afif, 2026. *Ketua NasDem Medan*. Wawancara pribadi. Medan.
- Sitepu Kesuma Andika, 2026. Kader Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Sumatera Utara. Wawancara oleh penulis.
- Noval Defri, 2026. *Kader DPW Partai NasDem Sumatera Utara*. Wawancara oleh penulis. Medan.
- Effendy, Bahtiar, 1998. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Huntington, Samuel P, 1996. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: Simon & Schuster.
- Iqbal, Muhammad, 2014. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Iskandar, 2026. *Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Sumatera Utara*. Wawancara oleh penulis. Medan.
- Dkk, Fajrussalam Hisny, 2022. Pelaksanaan Politik di Indonesia Berdasarkan Ajaran dan Nilai Dasar Politik Islam. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*.
- Musa, Muhammad Yusuf, 1963. *Nizham al-Hukm fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Silangit Tarigan Nusantara, 2026. *Ketua DPD Partai NasDem Deli Serdang*. Wawancara oleh penulis. Deli Serdang.
- Ubaedillah, A., dan Abdul Rozak. 2015. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Jakarta.